

## BAB II

### DINAMIKA BANTUAN LUAR NEGERI JEPANG DAN TIONGKOK

Pada bab ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dinamika bantuan luar negeri yang disalurkan baik oleh Jepang maupun Tiongkok kepada Indonesia. Penjelasan substansi yang akan dituliskan penulis berupa gambaran umum hubungan Indonesia-Jepang, bantuan-bantuan yang telah diberikan Jepang kepada Indonesia, hubungan antara Jepang dan Tiongkok, hingga posisi Indonesia di mata Jepang. Selain itu, pada bagian ini juga akan menjelaskan mengenai hubungan Indonesia-Tiongkok, bantuan apa saja yang sudah disalurkan Tiongkok kepada Indonesia, dan posisi Indonesia bagi Tiongkok.

#### **2.1 Latar Belakang Hubungan Jepang dan Tiongkok dengan Indonesia**

##### **2.1.1 Hubungan Jepang dan Indonesia**

Indonesia dan Jepang merupakan kedua negara yang memiliki sejarah hubungan yang panjang. Jepang pada awalnya merupakan negara yang berpegang teguh pada upaya untuk menutup diri dari pihak luar tepatnya pada era kekuasaan Tokugawa, Jepang melakukan perubahan secara perlahan. Salah satu upaya pembaruan paling berpengaruh milik Jepang ialah pada masa restorasi Meiji, yang dibarengi dengan mulai terbukanya Jepang pada pihak-pihak luar.<sup>45</sup> Manuver Jepang untuk berfokus pada bidang ekonomi membawa Jepang pada posisi layaknya negara yang terlahir kembali. Jepang memanfaatkan kesempatan serta

---

<sup>45</sup> Febriathina Hapsari, *Pengaruh Restorasi Meiji Menjadikan Jepang Sebagai Negara Imperialis* (Universitas Darma Persada, 2018).

kemampuan yang dimilikinya dengan cukup baik. Salah satu langkah Jepang dalam bentuk kekuatan barunya ialah dengan memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang.

Langkah baru Jepang yang lebih berfokus pada *soft power* membawa Jepang pada strategi mendapatkan atensi dari negara berkembang yang potensial, dan salah satunya ialah Indonesia. Indonesia dan Jepang mulai memiliki hubungan yang harmonis pada tahun 1958, setelah tercapainya perjanjian perdamaian bagi kedua negara. Hubungan harmonis tersebut terus berlanjut seiring berjalannya waktu, hal ini tidak lain dikarenakan komitmen kedua negara yang telah berjalan selama kurang lebih 60 tahun.<sup>46</sup> Jepang dan Indonesia menjalin begitu banyak kerjasama pada berbagai sektor, contohnya ekonomi, keamanan, sosial, hingga kebudayaan. Selain berbagai kerjasama, Jepang juga sering kali menyalurkan bantuan luar negeri kepada Indonesia, bantuan tersebut dapat berupa bantuan pembangunan atau dikenal sebagai *Official Development Assistance* (ODA), investasi atau penanaman modal, hingga bantuan ketika Indonesia mengalami bencana. Banyaknya kerjasama yang telah terjalin dan bantuan yang disalurkan menjadi bukti kuat bahwa Jepang dan Indonesia memiliki hubungan yang baik dan stabil.

Jepang dan Indonesia merupakan mitra ekonomi yang strategis bagi satu sama lain. Hal ini berkaitan dengan kondisi dan kepemilikan sumber daya unggul yang berbeda antar setiap negara. Perbedaan kondisi dan kepemilikan sumber daya

---

<sup>46</sup> Maulandy R. B. Kencana, *Jepang Bantu RI Bangun Infrastruktur Selama 60 Tahun, Apa Saja?*, Liputan6, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3720904/jepang-bantu-ri-bangun-infrastruktur-selama-60-tahun-apa-saja?page=2>.

tertentu membuat negara memiliki hubungan yang saling membutuhkan, praktik nyata dari kondisi ini mendorong negara untuk menghadirkan kerjasama ekonomi. Penjelasan tersebut dapat menjadi gambaran umum dari hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia. Jepang dengan sumber daya manusia dan perekonomiannya yang unggul membawanya menjadi negara investor di berbagai negara lain. Salah satu penerima investasi Jepang yang cukup besar ialah Indonesia. Meskipun Jepang tidak menempati urutan pertama dalam daftar negara investor di Indonesia, tetapi Jepang memiliki daya jualnya tersendiri. Hal tersebut ialah karakter investasinya yang berkualitas.<sup>47</sup>

Salah satu investasi atau proyek besar Jepang di Indonesia ialah proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT) Jakarta. Dalam proyek ini Jepang tidak hanya memberikan bantuan dari segi pendanaan, Jepang juga memberikan bantuan teknis kepada Indonesia melalui lembaga resmi pemerintahan Jepang yang memiliki fokus untuk bertanggung jawab dalam hal kerjasama luar negeri. Lembaga Jepang tersebut ialah *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Bantuan selain dari keuangan yang diberikan Jepang berupa bantuan dalam desain teknis kereta, melatih sumber daya manusia, hingga studi tentang kelayakan.<sup>48</sup> Tidak hanya sampai disitu, bahkan kerjasama perihal transportasi publik ini berlanjut dengan perluasan jangkauan MRT Jakarta itu sendiri. Hal seperti inilah yang kemudian dapat disebut sebagai investasi berkualitas yang diberikan Jepang. Namun,

---

<sup>47</sup> Whisnu B. Prasetyo, *Ini Daftar Investasi Baru Perusahaan Jepang di Indonesia*, Berita Satu, , <https://www.beritasatu.com/ekonomi/957191/ini-daftar-investasi-baru-perusahaan-jepang-di-indonesia>.

<sup>48</sup> Putri S. Pitaloka, *Kilas Balik Kerja Sama JICA Jepang dalam Pembangunan MRT Jakarta*, Tempo.co, <https://bisnis.tempo.co/read/1739214/kilas-balik-kerja-sama-jica-jepang-dalam-pembangunan-mrt-jakarta>.

walaupun Jepang memberikan bantuan yang berkualitas, bantuan maupun investasi Jepang di Indonesia belum semasif yang dilakukan Tiongkok. Tetapi setidaknya dalam beberapa tahun terakhir Jepang selalu menduduki posisi 4 besar dalam penanaman modal asing di Indonesia.

Perihal berinvestasi di Indonesia, Jepang tidak memiliki investasi semasif Tiongkok, tetapi Jepang memiliki keunggulan pada bidang lain perihal keberadaannya di Indonesia. Kelebihan tersebut adalah distribusi produk otomotif Jepang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari total penanaman modal di keseluruhan sektor, otomotif mendapat porsi sepertiganya.<sup>49</sup> Berdasarkan data dari situs Gaikindo, mulai dari penjualan tahunan dan jumlah ekspor kendaraan bermotor di Indonesia, perusahaan otomotif asal Jepang lah yang memimpin pada sektor tersebut. Keunggulan Jepang dalam sektor otomotif merupakan peluang besar Jepang untuk terus mempertahankan kedekatannya dengan Indonesia. Setidaknya lebih dari 90% pasar, produksi, serta ekspor bidang otomotif di Indonesia bergantung banyak dari investasi Jepang.<sup>50</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Jepang merupakan salah satu mitra penting Indonesia terutama dalam hal ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Disaat yang bersamaan, Indonesia juga menjadi mitra penting bagi Jepang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai pasar otomotif Indonesia yang dikuasai Jepang, artinya Jepang mendapatkan banyak keuntungan dari penjualan produknya di Indonesia. Terlepas dari itu, hal lain yang membuat Indonesia penting

---

<sup>49</sup> Kahfi, *65 Tahun Indonesia-Jepang, Industri Otomotif Semakin Matang*, Bisnis.com, <https://otomotif.bisnis.com/read/20231030/46/1709213/65-tahun-indonesia-jepang-industri-otomotif-semakin-matang>.

<sup>50</sup> *Ibid.*

bagi Jepang ialah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Jepang merupakan negara yang memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai sektor, seperti dari sektor teknologi, otomotif, hingga *pop-culture*. Namun salah satu tantangan yang dihadapi Jepang ialah perihal pasokan sumber daya energi. Pasokan sumber daya energi dalam negeri Jepang terbatas pada *biofuel*, energi hidro, panas bumi, dan bahan bakar nabati. Selebihnya dari itu, 96% energi Jepang bergantung pada impor sumber daya energi dari negara lain.<sup>51</sup>

Atas dasar kebutuhan impor energi yang tinggi tersebut lah Jepang memandang Indonesia sebagai mitra yang penting karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bahkan angka ekspor sumber daya energi yang dimiliki Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2022, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tercatat suplai energi mengalami kenaikan signifikan dari tahun tahun sebelumnya tepatnya pada nilai 1.739 juta BOE yang mana jumlah ini merupakan angka tertinggi sejak tahun 2012.<sup>52</sup> Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka nilai persentase kenaikannya sebesar 19%.<sup>53</sup>

### **2.1.2 Hubungan Tiongkok dan Indonesia**

Layaknya sebuah negara berkembang yang berupaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tentu tidak hanya menggantung diri hanya kepada satu mitra luar negeri saja atau kepada Jepang saja. Indonesia juga menjalin

---

<sup>51</sup> Danmei Zhu et al., *Analysis of the robustness of energy supply in Japan: Role of renewable energy*, Energy Reports 6 (2020): 378–391, <https://doi.org/10.1016/j.egy.2020.01.011>.

<sup>52</sup> Kelik Dewanto, *Kementerian ESDM terbitkan data statistik energi RI 2012-2022*, Antaranews, <https://www.antaranews.com/berita/3551901/kementerian-esdm-terbitkan-data-statistik-energi-ri-2012-2022>.

<sup>53</sup> Ibid.

berbagai kerjasama luar negeri dengan beberapa negara. Terlebih walaupun status Indonesia masih merupakan negara berkembang, namun kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak dapat dianggap remeh. Diantara banyaknya negara, salah satu negara yang memiliki kerjasama dan memiliki kedekatan intens dengan Indonesia ialah Tiongkok. Sama halnya dengan Jepang, Tiongkok juga menduduki banyak posisi penting layaknya Jepang bagi Indonesia. Salah satu kerjasama yang paling menonjol dari Tiongkok dan Indonesia ialah kerjasama kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan pada Oktober 2023.<sup>54</sup> Oleh karenanya latar belakang dari hubungan antara Indonesia dan Tiongkok menjadi salah satu pembahasan penting dalam penelitian ini.

Indonesia dan Tiongkok telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1950, dalam aspek hubungan diplomatik dapat dikatakan bahwa Tiongkok telah lebih dulu membangunnya dengan Indonesia dibandingkan Jepang yang baru secara resmi menjalin hubungan baik pada 1958.<sup>55</sup> Titik mulai kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ialah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal ini terlihat ketika Tiongkok yang menyalurkan beberapa beasiswa bagi anak bangsa Indonesia untuk dapat bersekolah di Negeri Tirai Bambu.<sup>56</sup> Namun, pada periode orde baru atau sekitar tahun 1960-an atas dasar perintah Presiden Soeharto Indonesia menghentikan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hal ini didasari dengan

---

<sup>54</sup> Dian E. Nugraheny dan Dani Prabowo, *Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai 'Whoosh'*, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/02/09361971/jokowi-resmikan-kereta-cepat-jakarta-bandung-yang-dinamai-whoosh>.

<sup>55</sup> Rissa Amanda, *Hegemoni Dibalik Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia*, *Pamator Journal* 14, no. 1 (2021): 34–39.

<sup>56</sup> *Ibid.*

banyaknya informasi yang menyatakan keterkaitan Tiongkok dengan PKI yang berkonotasi negatif akibat peristiwa G30S PKI.<sup>57</sup>

Pada era modern, terkhusus pada era presiden Joko Widodo dari pihak Indonesia dan Xi Jinping selaku kepala negara Tiongkok, hubungan kedua negara terlihat semakin memiliki kedekatan. Dikatakan demikian karena banyaknya kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok pada periode ini. Sebagai contoh, sektor yang terlihat jelas adalah pembangunan infrastruktur, secara lebih spesifik salah satu infrastruktur yang merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ialah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang jalurnya terpampang sepanjang 142 kilometer.<sup>58</sup> Baik bantuan maupun kerjasama luar negeri yang dilakukan Tiongkok tentu memiliki dasar atau tujuan.

Jika berbicara tentang Tiongkok, maka tidak asing dengan istilah ”jalur sutra” atau juga dikenal dengan *silk road*. Jalur sutra secara sederhana merupakan jalur perdagangan yang telah ada sejak era kuno yang membentang melewati Asia, mulai dari Tiongkok hingga Mediterania.<sup>59</sup> Pada era modern, pemanfaatan jalur tersebut kembali diinisiasi oleh Xi Jinping sejak tahun 2013, dengan hadirnya strategi *One Belt, One Road* (OBOR). Tujuan dari strategi ini tidak lain ialah untuk mempermudah kerjasama Tiongkok dengan berbagai negara sekaligus

---

<sup>57</sup> Muhammad Yamin dan Shellia Windymadaksa, *Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok*, Jurnal Politik Profetik 5, no. 2 (2017): 200–218.

<sup>58</sup> Istman, *Tak Ingin Rugi, Jokowi Minta Proyek Kereta Cepat Didetailkan*, Tempo.co, <https://bisnis.tempo.co/read/894445/tak-ingin-rugi-jokowi-minta-proyek-kereta-cepat-didetailkan>.

<sup>59</sup> Tri Indriawati, *Rute Jalur Sutra yang Menghubungkan Timur dan Barat*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/18/094351879/rute-jalur-sutra-yang-menghubungkan-timur-dan-barat?page=all#:~:text=Jalur Sutra kali pertama dikembangkan di masa Dinasti, hubungan antara China dan kerajaan-kerajaan di Asia Tengah.>

mempermudah transaksi perdagangan, serta sebagai stimulus pembangunan infrastruktur di berbagai negara berkembang yang dilalui oleh jalur sutra baru.<sup>60</sup>

Mengingat *master plan* yang dimiliki Tiongkok begitu ambisius, maka tidak heran dengan strateginya yang menyalurkan begitu banyak investasi dan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang. Praktik penyaluran bantuan dan pelaksanaan kerjasama bilateral tersebut menjadi peluang Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah. Melalui hal tersebut juga Tiongkok membentuk hubungan yang semakin kuat dengan negara penerima bantuan, yang kemudian Tiongkok akan mendapatkan sokongan baik dari aspek politik maupun ekonomi.<sup>61</sup> Dari gambaran strategi Tiongkok tersebut, maka tidak heran apa yang telah dilakukan Tiongkok kepada Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan negara berkembang yang potensial dengan kekayaan alam yang melimpah seperti batu bara, minyak, gas, dan lain-lain. Tiongkok sebagai negara industri yang besar tentu membutuhkan sumber daya energi dengan jumlah yang masif.

Dari kasus tersebut maka dapat dilihat titik temu kepentingan Tiongkok dengan Indonesia. Tiongkok negara industri yang membutuhkan sumber daya energi yang melimpah, namun terkendala karna negaranya sendiri tidak memiliki dalam jumlah besar. Bahkan pada tahun 2025 mendatang Tiongkok diperkirakan akan memiliki ketergantungan pada kebutuhan gas alam di angka 55%.<sup>62</sup> Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya energi yang

---

<sup>60</sup> Ni Putu Saraswati Puspita Dewi dan Hikmatul Akbar, *Kebijakan The New Silk Road Cina di Bawah Pemerintahan Xi Jinping*, Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan 9, no. 1 (2017): 1–19.

<sup>61</sup> Ibid. hal.13

<sup>62</sup> Jude Clemente, *China's Rising Natural Gas Demand, Pipelines, and LNG*, Forbes, <https://www.forbes.com/sites/judeclemente/2016/04/24/chinas-rising-natural-gas-demand-pipelines-and-lng/?sh=2eeb8b895d00>.

melimpah serta industrinya yang belum semasif Tiongkok, menjadi sasaran strategis bagi Tiongkok. Atas dasar kepentingan Tiongkok tersebut maka tidak heran jika Tiongkok mengusahakan berbagai hal untuk dapat memiliki kedekatan dengan Indonesia.

Intensi Tiongkok untuk mendapatkan keuntungan atau akses yang lebih mudah pada sumber daya yang dimiliki Indonesia diupayakan oleh Tiongkok melalui berbagai hal. Salah satu upaya yang dapat dilihat jelas ialah besaran investasi asing yang ditanamkan Tiongkok di Indonesia. Penanaman modal asing jika mengacu pada definisi menurut Salim (2012) dapat dipahami sebagai kegiatan memasukkan modal, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha di negara penerima. Dengan pembagian persentase modal yaitu pihak asing maksimal 95% dan negara dengan minimal 5%.<sup>63</sup> Niat Tiongkok untuk memberikan bantuan lalu kemudian mendapatkan kedekatan dengan Indonesia berjalan baik dikarenakan posisi Indonesia yang sedang berusaha bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tahun 2020. Langkah utama Tiongkok tersebut direalisasikan dengan menyalurkan penanaman modal dengan jumlah besar di Indonesia.

---

<sup>63</sup> Haji Salim HS. dan Budi Sutrisno, *Hukum investasi di Indonesia*, 2 ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

**Tabel 2. 1 Negara dengan Realisasi Investasi Asing Terbesar di Indonesia Tahun 2022**

Realisasi Investasi Asing di Indonesia Tahun 2022		
No.	Nama Negara	Nominal (dalam USD)
1	Singapura	10,5 miliar
2	Tiongkok	5,19 miliar
3	Hongkong	3,9 miliar
4	Jepang	2,8 miliar
5	Malaysia	2,2 miliar
6	Amerika Serikat	2,1 miliar
7	Korea Selatan	1,6 miliar
8	Belanda	1,1 miliar
9	Bermuda	760 juta
10	Inggris	507 juta

*Sumber: Katadata Media Network<sup>64</sup>*

Berdasarkan data dari situs databoks yang mengutip dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka US\$33,39 miliar. Dari 10 negara investasi asing terbesar di Indonesia, Tiongkok berada di posisi kedua dengan nominal US\$5,19 miliar setelah Singapura yang memiliki nilai realisasi investasi hingga US\$10,54 miliar. Hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan serius mengingat tingginya akan investasi tersebut berarti berbanding lurus dengan banyaknya proyek pembangunan Indonesia yang berkaitan dengan Tiongkok. Setidaknya terdapat tiga proyek besar Indonesia yang berada dibawah sokongan Tiongkok. Pertama, proyek Waduk Jatigede yang dibiayai utang luar negeri dari Tiongkok sebesar US\$215,62 juta. Kedua, proyek Tol Medan-Kualanamu dengan keperluan biaya sebesar Rp1,347 triliun, dan 90% dari jumlah tersebut disokong

<sup>64</sup> Cindy Mutia Annur, *10 Negara Asal Investasi Asing Terbesar di Indonesia Tahun 2022*, Katadata Media Network, Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/10/10-negara-asal-investasi-asing-terbesar-di-indonesia-tahun-2022>.

oleh Tiongkok. Dan ketiga, proyek terbaru yang juga memakan biaya besar yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mendapat dana investasi dari Tiongkok sebesar Rp56 triliun.<sup>65</sup>

Dari tiga proyek besar tersebut, terlihat jelas Tiongkok berupaya serius untuk dapat memiliki kedekatan dengan Indonesia. Upaya Tiongkok berbuah manis, mengingat pernyataan presiden Jokowi tentang pentingnya Tiongkok sebagai mitra Indonesia.<sup>66</sup> Ketika Indonesia memandang Tiongkok sebagai mitra strategis, disaat yang bersamaan Tiongkok pun merasakan demikian. Tiongkok memiliki latar belakang kuat memandang Indonesia sebagai mitra yang penting, hal ini berhubungan dengan kepentingan nasional yang dimilikinya, yaitu perihal kebutuhan sumber daya energi. Tiongkok telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat masif karena kesuksesan industrinya. Disaat yang bersamaan industri Tiongkok yang masif ini menuntut kebutuhan sumber daya energi yang masif pula. Pada 2014, tercatat Tiongkok menyandang status sebagai salah satu negara pengimpor minyak terbesar di dunia. Tiongkok memiliki rata-rata impor minyak 6,1 juta barel perhari.<sup>67</sup>

Dengan tingginya angka kebutuhan Tiongkok akan sumber daya energi. Maka dapat dikatakan Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki ketergantungan terhadap impor sumber daya energi dari negara lain. Ketergantungan Tiongkok pada impor sumber daya energi ini disebabkan oleh

---

<sup>65</sup> Indra Gunawan, *Jokowi Bertemu Xi Jinping, Ini Daftar Proyek Jumbo China di RI*, Bisnis.com, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220727/45/1559764/jokowi-bertemu-xi-jinping-ini-daftar-proyek-jumbo-china-di-ri>.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Op. Cit.* Dewi dan Akbar, hal. 9

beberapa faktor domestik seperti perkembangan ekonomi yang disebabkan kebutuhan industri, urbanisasi masyarakat yang masif, dan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi masyarakat Tiongkok.<sup>68</sup> Disamping itu, pentingnya posisi Indonesia bagi Tiongkok juga dikarenakan letak Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam *master plan* yang dimiliki Tiongkok karena merupakan bagian penting dari jalur sutra baru yang diusung presiden Xi. Kawasan Asia Tenggara termasuk kawasan yang dilalui rute *The 21st Maritim Silk Road*, rute ini mengarahkan Tiongkok pada kawasan yang memiliki target strategis seperti minyak, impor biji tembaga, dan bijih besi.<sup>69</sup> Dari beberapa target yang diinginkan Tiongkok hampir semua sumber daya tersebut dimiliki oleh Indonesia. Tetapi, segala strategi yang dimiliki Tiongkok tersebut harus tertahan atas dasar peristiwa yang terjadi pada akhir tahun 2019, ketika terdeteksinya untuk pertama kali kasus infeksi virus Covid-19.

Pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.<sup>70</sup> Kemudian, pada Juni 2021, virus tersebut dinyatakan secara resmi telah menyebar dalam skala global dan telah menyebabkan 3,9 juta kasus kematian dari seluruh dunia.<sup>71</sup> Sejak awal 2020, dunia internasional menghadapi permasalahan serius yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Dalam rangka menghadapi permasalahan ini, WHO menyarankan kepada setiap negara untuk

---

<sup>68</sup> David Zweig dan Jianhai Bi, *China's Global Hunt for Energy*, Foreign Affairs 84, no. 5 (2005): 25–38.

<sup>69</sup> Dewi dan Akbar, “Kebijakan The New Silk Road Cina di Bawah Pemerintahan Xi Jinping.”

<sup>70</sup> Asep Setiawan, *Politik Luar Negeri Indonesia Era Covid-19: Penyelamatan dan Kerjasama*, Independen, Jurnal Politik Indonesia dan Global 1, no. 2 (2020): 65–74, <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen%0AVolume>.

<sup>71</sup> Britt Yip dan Valeria Perasso, *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?*, BBC News Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>.

menerapkan pembatasan kegiatan, bahkan pada kasus tertentu diminta untuk menerapkan *lockdown*.

Imbauan untuk mengatasi permasalahan penyebaran tersebut melalui pembatasan kegiatan ternyata membawa efek domino pada sektor selain dari kesehatan. Sebagai contoh, sebab diterapkannya pembatasan tersebut aktifitas ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Berdasarkan data yang dirilis oleh OECD<sup>72</sup> pada bulan Maret 2020, memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan menghadapi kesulitan hingga turun pada angka 2,4% di tahun 2020.<sup>73</sup> Tantangan ekonomi ini kemudian membawa permasalahan lainnya dikemudian hari, yaitu permasalahan sosial. Permasalahan sosial yang terjadi seperti meningkatnya angka kemiskinan di berbagai negara. Meningkatnya kemiskinan ini juga membawa masalah selanjutnya berupa meningkatnya angka kriminalitas, sebagai contoh kasus hal tersebut terjadi di Nigeria dan di Meksiko.<sup>74</sup>

Tidak hanya berdampak hingga angka kriminalitas, keadaan krisis pandemi Covid-19 juga membawa dampak buruk pada sektor politik. Dengan banyaknya efek domino dari covid-19, seiring berjalannya waktu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kian menurun. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa pemerintah tidak dapat menghadapi pandemi dengan baik,

---

<sup>72</sup> *Organisation for Economic Co-operation and Development secara sederhana dikenal sebagai organisasi ekonomi internasional.*

<sup>73</sup> OECD, *OECD Economic Outlook, Interim Report March 2020*, OECD Economic Outlook (OECD, Maret 2020), [https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2\\_7969896b-en](https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en).

<sup>74</sup> Odita Sunday, *Why crime rate may rise after COVID-19*, TheGuardian, <https://guardian.ng/news/why-crime-rate-may-rise-after-COVID-19/>.

bahkan tidak menutup kemungkinan akan dikorelasikan dengan isu-isu keamanan nasional.<sup>75</sup>

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 hubungan antar negara sering kali diisi dengan kerjasama militer, bantuan pembangunan infrastruktur, dan beberapa bantuan yang bertujuan untuk menekankan penerapan demokrasi yang lebih baik di beberapa negara. Namun, pasca kehadiran pandemi Covid-19, pola bantuan dan hubungan antar aktor tersebut mulai berubah. Bantuan yang disalurkan lebih berfokus pada bantuan kemanusiaan dan bantuan untuk pemulihan ekonomi negara terdampak.

## **2.2 Bantuan Luar Negeri Jepang dan Tiongkok Kepada Indonesia**

Sepanjang sejarah hubungan bilateral baik antara Jepang-Indonesia maupun Tiongkok-Indonesia, kedua negara tersebut berperan besar dalam perkembangan pembangunan dan ekonomi Indonesia. Indonesia dengan kedua negara tersebut telah memiliki kesepakatan sebagai mitra strategis bagi satu sama lain. Indonesia dengan Tiongkok telah memiliki kesepakatan kerjasama strategis dengan Indonesia sejak tahun 2005 dan Indonesia juga memiliki kerjasama *Economic Partnership* dengan Jepang sejak tahun 2007.<sup>76</sup>

Terjadinya pandemi Covid-19 memaksa pola hubungan internasional untuk beradaptasi dengan keadaan. Setidaknya terdapat dua pendapat dasar perihal

---

<sup>75</sup> Idil Syawfi, *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Hubungan Internasional: Menuju Dunia Paska-Liberal*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 0, no. 0 (2020): 23–29, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3864>.

<sup>76</sup> Masaya Watanabe, Dian Effendy, dan Ruli Inayah Ramadhoanc, *Indonesia among Japan and China: A Managed Interdependence Approach?*, UMM International Conference on Pure and Applied Research 2015 (2015): 297–306.

dampak pandemi kepada hubungan internasional. Terdapat sebagian ahli yang memandang pandemi Covid-19 sebagai peristiwa yang akan berdampak buruk pada jangka panjang atau pesimis pada aktor-aktor hubungan internasional. Kemudian, sebagian lainnya berpendapat bahwa pandemi ini hanya krisis sementara yang dikemudian hari akan kembali menjadi keadaan normal yang sudah diterima masyarakat. Salah satu pandangan penting lainnya, ialah sebagian ahli yang berpendapat bahwa pandemi Covid-19 akan membawa perubahan masif pada sistem politik global.<sup>77</sup>

### **2.2.1 Bantuan Jepang kepada Indonesia**

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, Jepang telah menyalurkan berbagai bantuan luar negeri berupa bantuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya ialah Jepang yang menyalurkan bantuan/kerjasama yang berdampak sangat besar bagi masyarakat kota Jakarta. Bantuan tersebut ialah pembangunan MRT Jakarta. Dalam kerjasama ini Jepang berperan untuk mengirimkan tenaga ahli Jepang ke Indonesia, menarik SDM Indonesia untuk melakukan magang di Jepang, dan memberikan alat berupa mesin beserta peralatan lainnya. Semua penyaluran bantuan tersebut diawasi melalui salah satu lembaga independen milik pemerintah Jepang yaitu JICA. Pada kunjungannya ke Jakarta di awal 2020 Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi menyatakan bahwa kerjasama MRT Jakarta merupakan proyek kerjasama terbaik antara Jepang dan Indonesia.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Syawfi, *Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Hubungan Internasional: Menuju Dunia Paska-Liberal.*

<sup>78</sup> Aji Cakti, *MRT Jakarta proyek terbaik kerjasama Jepang-Indonesia*, Antaranews, <https://www.antaranews.com/berita/1244824/mrt-jakarta-proyek-terbaik-kerjasama-jepang-indonesia>.

Kesuksesan kerjasama pembangunan MRT tersebut tercermin dari kerjasama berikutnya, yaitu berlanjutnya pembangunan MRT fase dua. Pada Oktober 2022, Pemerintah Indonesia kembali menandatangani MoU dengan Jepang mengenai kerjasama teknis pembangunan MRT jalur timur-barat yang mulai dibangun pada akhir 2022.<sup>79</sup> Jika pada fase pertama MRT Jakarta Jepang melalui JICA telah menyalurkan bantuan hingga nominal Rp14,2 triliun, pada fase kedua ini Jepang kembali menyalurkan bantuan dengan perkiraan nominal hingga Rp22,5 triliun.<sup>80</sup> Kelanjutan kerjasama ini sekaligus menjadi sokongan pemerintah Jepang kepada Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Dengan kehadiran jangkauan yang lebih luas dari moda transportasi umum ini semakin mempermudah mobilisasi masyarakat sekaligus bertambahnya peluang-peluang akselerasi ekonomi.

Pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh negara di dunia, baik dari sektor kesehatan, sosial, ekonomi, hingga pola hubungan negara tersebut dengan aktor HI lainnya. Jepang sebagai salah satu negara yang masif menjalankan kerjasama serta bantuan kepada Indonesia juga melakukan adaptasi atas dasar merespon terjadinya pandemi Covid-19. Dalam merespon terjadinya pandemi covid-19, Jepang sigap memberikan bantuan kepada Indonesia berupa bantuan darurat. Bantuan darurat tersebut berupa pemberian alat kesehatan, dosis vaksin Covid-19, dan obat-obatan.

---

<sup>79</sup> “Penandatanganan Minutes of Understanding Untuk Kerjasama Teknis Proyek Jalur Timur-Barat Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta,” *JICA*, diakses Maret 18, 2024, <https://www.jica.go.jp/Resource/indonesia/indonesian/office/others/press221024.html>.

<sup>80</sup> Rully R. Ramli dan Bambang P. Jatmiko, “JICA Siap Bantu Pemerintah Danai Proyek MRT di Beberapa Kota,” *Kompas.com*, diakses Maret 22, 2024, <https://money.kompas.com/read/2020/01/10/191700626/jica-siap-bantu-pemerintah-danai-proyek-mrt-di-beberapa-kota>.

Jepang juga selalu menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia menghadapi pandemi ini sekaligus membantu ekonomi Indonesia untuk kembali pulih.

Seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 di Indonesia perlahan diredam. Fokus pemerintah pun perlahan beralih, dari yang semula berfokus bantuan jangka pendek seperti dosis vaksin, alat kesehatan, dan obat-obatan perlahan beralih pada bantuan yang berfokus untuk pemulihan ekonomi. Sebab salah satu masalah lainnya disamping sektor kesehatan yang diakibatkan pandemi Covid-19, sektor ekonomi juga menjadi sektor yang terpuak cukup keras. Pada Agustus 2022, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke negeri Sakura, yang kemudian membuahkan hasil mendapat bantuan ekonomi dari Jepang. Bantuan ekonomi tersebut berupa investasi perusahaan Jepang yaitu Mitsubishi Motor Company (MMC), MMC sepakat untuk menambah suntikan investasi kepada Indonesia dengan penentuan target sebesar Rp10 triliun yang dimulai sejak 2022 sampai 2025. Selain MMC juga terdapat peningkatan investasi dari TMC sebesar Rp27,1 triliun<sup>81</sup>

Selain peningkatan angka investasi beberapa perusahaan Jepang di Indonesia, Jepang juga memberikan harapan kepada Indonesia melalui komitmennya untuk membantu pembangunan proyek strategis nasional. Sebagai contoh ialah proyek Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Proyek ini akan dibiayai Jepang yang akan disalurkan melalui tiga tahap. Tahap pertama, yaitu tahun 2018-

---

<sup>81</sup> Kristantyo Wisnubroto, *Komitmen Investasi Jepang dan Korsel, dari Kendaraan Listrik hingga IKN*, Indonesia.Go.Id, Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5509/komitmen-investasi-jepang-dan-korsel-dari-kendaraan-listrik-hingga-ikn?lang=1>.

2023, akan dibiayai Jepang melalui pinjaman JICA dengan nominal Rp14 triliun dan Rp9,5 triliun.<sup>82</sup> Dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu untuk tahun 2024-2025, dengan estimasi biaya kurang lebih Rp7,58 triliun.<sup>83</sup> Dan tahap ketiga yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, pada tahun 2026-2027, dengan estimasi biaya Rp3,86 triliun.<sup>84</sup>

## 2.2.2 Bantuan Tiongkok kepada Indonesia

Layaknya Jepang yang telah mengucurkan banyak bantuan atau menjalin beberapa kerjasama dengan Indonesia, Tiongkok pun melakukan hal serupa. Hubungan bilateral yang telah terjalin sejak tahun 1950 membuat Tiongkok menjadi salah satu mitra bersejarah bagi Indonesia. Terlebih pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia menjadi semakin dekat dengan Tiongkok musabab banyaknya kerjasama dan bantuan luar negeri Tiongkok kepada Indonesia. Masifnya bantuan Tiongkok kepada Indonesia tidak lain dikarenakan Indonesia menjadi bagian penting dari strategi besar Tiongkok bernama *One Belt, One Road*.<sup>85</sup> Berikut beberapa kerjasama/bantuan Tiongkok kepada Indonesia.

Salah satu bantuan terbesar Tiongkok ialah proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang bahkan memiliki status sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pembangunan proyek kereta cepat ini tentunya juga menjadi bagian dari strategi OBOR yang dimiliki Tiongkok. Keuntungan yang didapatkan Indonesia dari kerjasama ini ialah meningkatkan serta mempermudah alur perdagangan dan mobilisasi masyarakat. Disaat yang bersamaan proyek ini juga

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ibid.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Dewi dan Akbar, *Kebijakan The New Silk Road Cina di Bawah Pemerintahan Xi Jinping.*”

dapat menjadi daya jual Indonesia dalam hal perdagangan domestik dan internasional.<sup>86</sup> Proyek ini mendapatkan investasi sebesar US\$ 5,573 miliar dan pada awalnya dikatakan bahwa proyek ini tidak akan melibatkan APBN.<sup>87</sup>

Namun, berakhir membengkak dan ditambahkan menggunakan kas pemerintahan. Pembengkakan dana pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini juga menyebabkan Tiongkok untuk kembali menyalurkan suntikan dana tambahan sebesar US\$550 juta atau jika dalam rupiah sebesar Rp8,3 triliun.<sup>88</sup> Dana tersebut disalurkan melalui China Development Bank (CDB). Penambahan suntikan dana tersebut di konfirmasi oleh Rahadian Ratry selaku General Manager Corporate Secretary KCIC. Ratry menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut akan digunakan untuk biaya pembebasan lahan, biaya persinyalan, dan lain-lain.<sup>89</sup> Penambahan biaya ini tentunya membawa dampak pada semakin membengkaknya hutang luar negeri Indonesia kepada Negeri Tirai Bambu.

Tiongkok juga tercatat memberikan bantuan berupa pembangunan pusat industri di Morowali, Sulawesi Tengah yang kemudian dikenal dengan Indonesia Morowali Industrial Park. PT IMIP pada dasarnya ialah perusahaan tambang nikel yang merupakan milik bersama Shanghai Decent Investment (Tiongkok) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 49,69%, PT Sulawesi Mining Investment

---

<sup>86</sup> Handriyanto Wijaya, *Aktualisasi Kebijakan China One Belt and One Road Di Indonesia Melalui Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung*, Jurnal Dinamika Global 5, no. 01 (2020): 109–122.

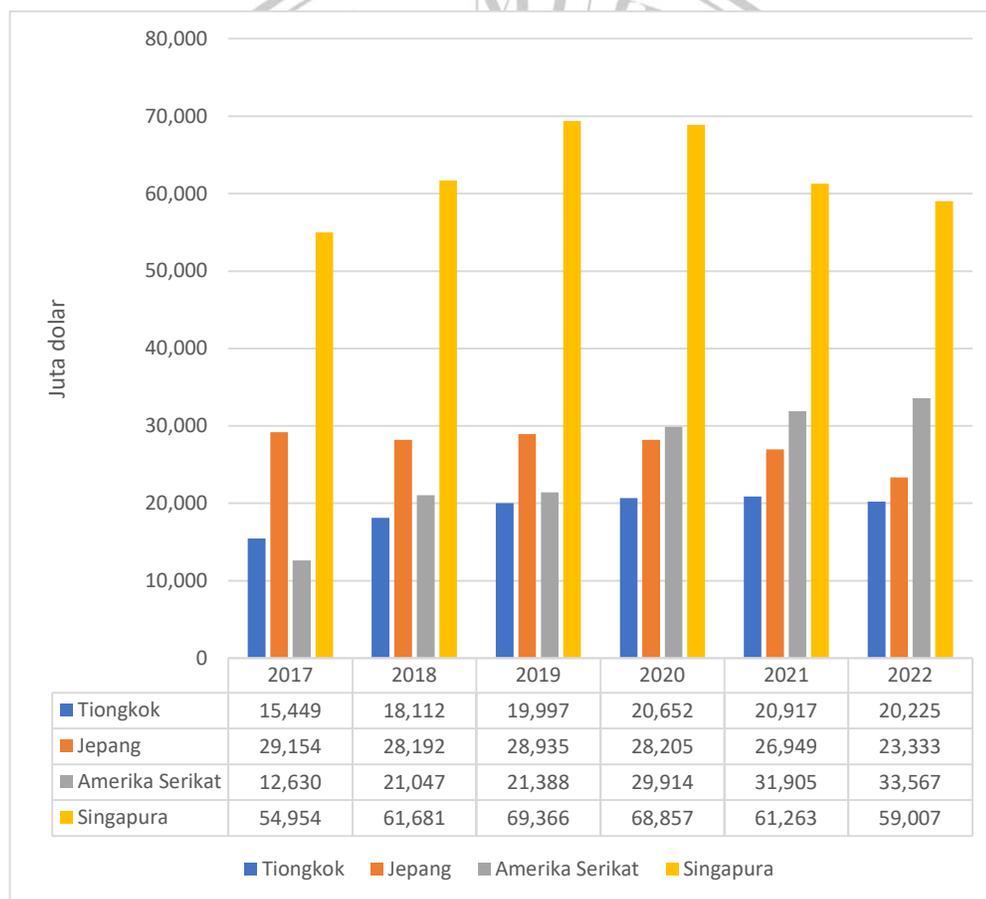
<sup>87</sup> *Op. Cit.* Erma Fitriyani, “Bendungan hingga Kereta Cepat, Megaprojek yang Didanai Utang China,” *Kumparan*, last modified 2021, diakses Maret 19, 2024, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bendungan-hingga-kereta-cepat-megaprojek-yang-didanai-utang-china-lwj1Hr1JMub/full>.

<sup>88</sup> Ferry Sandi, “Utang Baru Proyek Kereta Cepat Rp 8 T, Duitnya untuk Ini,” *CNBC Indonesia*, last modified 2023, diakses Maret 25, 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230222132547-4-416019/utang-baru-proyek-kereta-cepat-rp-8-t-duitnya-untuk-ini>.

<sup>89</sup> *Ibid.*

sebesar 25%, dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31%.<sup>90</sup> Pembangunan pusat industri ini berhasil mendorong Indonesia menjadi eksportir baja terbesar bagi Tiongkok pada tahun 2020 dengan nominal mencapai US\$7,53 miliar dan kuantitas sebesar 6,03 juta ton.<sup>91</sup>

**Grafik 2. 1 Hutang Luar Negeri Indonesia Berdasarkan Kreditor (2017-2022)**



Sumber: Bank Indonesia<sup>92</sup>

<sup>90</sup> *Investasi China Mengubah Morowali Jadi Kawasan Industri Penting di Dunia*, AsiaToday, Diakses dari <https://asiatoday.id/read/investasi-china-mengubah-morowali-jadi-kawasan-industri-penting-di-dunia>.

<sup>91</sup> Eri Sutrisno, *Baja Indonesia Kokoh di Pasar Dunia*, Indonesia.Go.Id, Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4523/baja-indonesia-kokoh-di-pasar-dunia>.

<sup>92</sup> Bank Indonesia, *Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 2019* (Jakarta, 2019), Diakses dari <https://www.bi.go.id/en/statistik/ekonomi-keuangan/sulni/Documents/SULNI-DEC-19.pdf>.

Bantuan-bantuan yang disebutkan sebelumnya hanya beberapa dari keseluruhan bantuan/kerjasama yang diberikan Tiongkok kepada Indonesia. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dari tahun 2017 hingga 2022, Tiongkok selalu menduduki posisi 4 besar sebagai negara pemberi hutang bersamaan dengan Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat. Dari besarnya nominal yang diberikan dapat dilihat bahwa Tiongkok memiliki niat serius untuk membangun kedekatan dengan Indonesia. Hal tersebut tidak lain dikarenakan kepentingannya yang berupa praktik kebijakan BRI serta upayanya untuk mendapatkan kedekatan dengan Indonesia agar kelak Indonesia dapat berada di bawah pengaruh Tiongkok.

Dalam merespon mewabahnya covid-19 di Indonesia, Tiongkok beberapa kali menyalurkan bantuan darurat berupa alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin covid-19 dalam jumlah yang cukup besar. Salah satu bantuan signifikan lainnya dari Tiongkok ialah melakukan pembangunan pabrik biofarmasi untuk produksi vaksin Covid-19. Pabrik tersebut memiliki nama PT Etana Biotechnologies Indonesia, dan memiliki letak di Jakarta. Bentuk kerjasama dari pembangunan pabrik ini adalah Tiongkok memberikan transfer teknologi mRNA. Pabrik PT Etana Biotechnologies Indonesia juga mendapat bantuan pengembangan dari perusahaan asal Tiongkok yaitu China Suzhou Abogen CO., Ltd.<sup>93</sup> Pada kerjasama ini Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia meyakinkan bahwa hasil dari kerjasama ini akan membawa dampak yang sangat positif bagi Indonesia karena dapat mempermudah kedua negara dalam mendapatkan dosis vaksin Covid-19.

---

<sup>93</sup> Xinhua, *Indonesia resmikan pabrik vaksin COVID-19 didukung teknologi China*, Antaranews, Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3167657/indonesia-resmikan-pabrik-vaksin-covid-19-didukung-teknologi-china>.

Banyaknya bantuan diatas dibarengi dengan penambahan suntikan dana di berbagai kerjasama infrastruktur lainnya membuat melonjaknya angkat utang luar negeri Indonesia kepada Tiongkok. Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada kuartal ke-4 tahun 2019, nominal utang luar negeri kepada Tiongkok berada di angka US\$18,015 juta.<sup>94</sup> Sedangkan, pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Oktober, tercatat oleh Bank Indonesia utang luar negeri Indonesia pada Tiongkok mengalami kenaikan menjadi US\$20,225 juta.<sup>95</sup> Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat mengingat semakin banyaknya kerjasama/bantuan yang terjalin antara Tiongkok dengan Indonesia.

### **2.3 Hubungan Jepang dan Tiongkok**

Jejak historis hubungan Jepang dan Tiongkok dimulai pada tahun 1894, tepatnya pada peristiwa *First Sino-Japanese War*. Alasan dasar terjadinya peperangan ini ialah perebutan kekuasaan untuk wilayah Korea. Hubungan Jepang-Tiongkok yang pada awalnya berjalan baik-baik saja berubah seketika pada masa restorasi Meiji di Jepang. Restorasi Meiji sendiri merupakan era dimana terjadinya perpindahan kekuasaan dari era kepemimpinan Tokugawa setelah keluarga Tokugawa berkuasa selama kurang lebih 200 tahun.<sup>96</sup> Keluarga Tokugawa merupakan keluarga yang memiliki latar belakang militer. Restorasi Meiji

---

<sup>94</sup> Bank Indonesia, 2019, *Loc. Cit.*

<sup>95</sup> Bank Indonesia, 2022 *Loc. Cit*

<sup>96</sup> Yunika Nurdina Sari, Ridwan Melay, dan Tugiman, *Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap Modernisasi Di Negara Jepang Tahun 1868-1912*, *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699, [https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/1233/JURNAL\\_YUNIKA\\_NURDINA\\_SARI.pdf?sequence=1](https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/1233/JURNAL_YUNIKA_NURDINA_SARI.pdf?sequence=1).

membawa kembali kursi kekuasaan pada kepemimpinan di bawah seorang Kaisar. Selain itu, Restorasi Meiji juga sering kali disebut dengan era modernisasi Jepang, karena pada masa itulah pemerintahan Jepang mulai terbuka perihal hubungannya dengan negara lain.

Perkembangan yang dimiliki Jepang membawanya pada ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Timur, termasuk daerah Korea.<sup>97</sup> Ambisi tersebut berujung pada konflik dengan Tiongkok, karena Tiongkok menganggap bahwa tindakan Jepang yang ingin memperluas kekuasaan ke wilayah Korea berpotensi sebagai tempat transit Jepang sebelum akhirnya menginvasi Tiongkok. Tiongkok merasa gerakan Jepang yang menuju Korea sebagai ancaman diakrenakan pada masa itu, Tiongkok telah lebih dulu menduduki kekuasaan di wilayah Korea dan menutupnya rapat-rapat dari Jepang. Korea menjadi wilayah yang strategis di kawasan Asia Timur kala itu dikarenakan kepemilikannya terhadap sumber daya bahan mentah yang berguna untuk industri.<sup>98</sup> Oleh karena itu, Jepang dan Tiongkok memiliki ambisi yang sama untuk menguasai wilayah Korea.

Secara lebih spesifik, Perang Tiongkok-Jepang I tersebut juga terjadi karena dinamika politik domestik Korea pada masa itu. Terdapat sebuah partai konservatif Korea dengan nama Tonghak, Tonghak merupakan kelompok orang-orang konservatif yang memiliki konflik dengan kelompok progresif Korea pada masa

---

<sup>97</sup> Nur Alifi Wijayanti dan Widya Lestari Ningsih, *Perang China-Jepang I: Penyebab, Jalannya Pertempuran, dan Dampak*, Kompas.com, Diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/28/130000679/perang-china-jepang-i--penyebab-jalannya-pertempuran-dan-dampak#>.

<sup>98</sup> Ibid.

itu.<sup>99</sup> Pada masa itu kelompok Tonghak tersebut meminta sokongan dari Tiongkok guna memenangkan konflik internal tersebut. Disaat yang bersamaan, kelompok progresif Korea juga meminta bantuan dari pihak Jepang. Hingga pada akhirnya hal ini juga menyeret Jepang dan Tiongkok menjadi musuh bagi satu sama lain. Dampak dari perang ini adalah banyaknya korban yang berjatuh dari kedua negara. Total prajurit Tiongkok yang gugur sebanyak 35.000 jiwa, sedangkan Jepang mengalami kematian prajurit sebanyak 13.823 jiwa.<sup>100</sup>

Pada Perang Tiongkok-Jepang II (1937-1945), citra Jepang menjadi sangat buruk di mata Tiongkok. Setelah perang kedua negara berakhir, Jepang dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas kejahatan perang yang terjadi. Fenomena yang sangat disoroti oleh media internasional adalah perihal Pembantaian Nanjing, yang merupakan salah satu peristiwa terkelam yang dimiliki Jepang.<sup>101</sup> Peristiwa yang dikenal dengan *Nanjing Massacre* ini terjadi saat Jepang berhasil menduduki wilayah Tiongkok, tepatnya kota Nanjing. Nanjing pada masa itu merupakan ibu kota dari Tiongkok sendiri, oleh karenanya sudah sangat wajar jika terdapat ratusan ribu atau bahkan lebih penduduk yang menetap di dalamnya.

Pasukan militer Jepang yang pertama kali menginjakkan kaki di Nanjing adalah pasukan yang dikomandani Jenderal Matsui Iwane. Militer Jepang sendiri pada masa itu terkenal dengan kebrutalannya yang tidak mengenal belas kasihan. Jenderal Matsui memerintahkan pasukannya untuk meratakan kota Nanjing, membunuh pasukan musuh, bahkan melakukan tindak pemerkosaan pada

---

<sup>99</sup> Ibid.

<sup>100</sup> Ibid.

<sup>101</sup> T. Editors of Encyclopaedia Britannica, *Loc. Cit.*

penduduk Nanjing.<sup>102</sup> Tidak hanya sampai disitu, pasukan Jepang juga melakukan pembakaran kota dan penjarahan pada toko-toko di Nanjing. Meskipun, pasca berakhirnya Perang Dunia II, pemimpin pasukan militer Jepang yang bertugas dalam penjajahan ke Nanjing mendapatkan hukuman atas dasar tindak kejahatan perang oleh Pengadilan Militer Internasional dan berakhir mendapatkan hukuman eksekusi mati.<sup>103</sup> Peristiwa tersebut terus menjadi alasan dasar Tiongkok untuk memiliki rasa skeptis kepada Jepang, bahkan pada era modern sekalipun.

Berakhirnya Perang Tiongkok-Jepang pertama tidak serta merta menjadi konklusi hubungan kedua negara ini. Perang Jepang dan Tiongkok kembali terjadi pada tahun 1937-1945. Walaupun Jepang telah memenangkan perang pertama, Jepang masih belum merasa puas atas kekuasaannya di kawasan Asia Timur. Jepang memiliki ambisi untuk mendominasi lebih jauh lagi negara-negara kawasan Asia Timur. Awal mula terjadinya perang ini ialah insiden Jembatan Marco Polo, ketika salah satu prajurit Jepang dicurigai telah diculik oleh Tiongkok, kemudian Jepang melakukan penembakan di Jembatan Marco Polo.<sup>104</sup> Namun, pada perang kedua ini Jepang sedang berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dikatakan demikian, karena disaat yang bersamaan pada saat Jepang melawan Tiongkok, yang telah mendapat dukungan dari negara barat seperti Inggris,

---

<sup>102</sup> Jawahir Gustav Rizal dan Rizal Setyo Nugroho, "Peristiwa Pembantaian Nanjing 13 Desember 1937, Ratusan Ribu Warga Sipil Tewas," *Kompas.com*, last modified 2021, diakses Maret 27, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/13/110000165/peristiwa-pembantaian-nanjing-13-desember-1937-ratusan-ribu-warga-sipil?page=3>.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Nur Alifi Wijayanti dan Widya Lestari Ningsih, *Perang China-Jepang II: Latar Belakang, Kronologi, dan Dampak*, Kompas.com, diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/29/080000579/perang-china-jepang-ii--latar-belakang-kronologi-dan-dampak>.

Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat. Hal ini tentu menjadi tantangan tambahan bagi Jepang.

Tiongkok pada masa itu telah menjadi bagian "The Big Five" bersamaan dengan negara yang memberikan pengaruh kepadanya. Negara-negara tersebut ialah Inggris, Perancis, Belanda, dan Amerika Serikat.<sup>105</sup> Disaat itu juga, Jepang sedang berhadapan dengan negara barat dalam konteks Perang Dunia II. Perang Dunia II tersebut memiliki hasil berupa kekalahan Jepang, atas dasar hal tersebut Jepang kehabisan armada perang dan mengalami kekalahan dalam dua perang sekaligus. Walaupun demikian, perang ini tetap membawa kerugian besar bagi Tiongkok baik dari segi ekonomi maupun korban jiwa yang berjatuhan. Perang ini menjadi perang terbesar di Asia pada abad ke-20.<sup>106</sup>

Berlanjut pada tahun 1970-an sempat terdapat perubahan dinamika antara hubungan tiga negara yaitu Amerika Serikat-Tiongkok-Uni Soviet. Perubahan dinamika tersebut membawa Tiongkok dan Jepang pada hubungan yang sedikit membaik, karena kesepakatan mereka tentang sikap anti hegemoni Uni Soviet, sebab pada masa itu Uni Soviet merupakan negara dengan kekuasaan yang sangat besar.<sup>107</sup> Walaupun pada posisi hubungan yang terkesan menjadi sedikit lebih baik tersebut, baik Jepang dan Tiongkok masih berpegang teguh untuk tidak mengadakan kerjasama bilateral di bidang keamanan nasional. Selain itu, juga terdapat beberapa peristiwa penting lainnya pada tahun 1970-an dalam hubungan Jepang-Tiongkok. Pada September tahun 1972, Jepang dan Tiongkok resmi

---

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid.

<sup>107</sup> Yinan He, *Op. Cit.*

mengakhiri kondisi perang melalui Komunike Bersama Tiongkok-Jepang. Kemudian pada 1978, telah diresmikan Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan Tiongkok-Jepang (Peace and Friendship Treaty, PFT).

Berlanjut pada tahun 1979, Jepang pertama kali menyalurkan bantuan luar negeri berupa ODA kepada Tiongkok. Pada masa normalisasi tersebut juga kedua pemimpin dari masing-masing negara, Den Xiaoping dan Zhou Enlai bersepakat untuk melakukan kerjasama eksplorasi sumber daya energi berupa minyak yang diperkirakan berada di dekat kepulauan yang padahal sedang menjadi sengketa bagi kedua negara.<sup>108</sup> Kemudian, terjadi perubahan signifikan dari kondisi hubungan kedua negara pada tahun 1980-an. Pada tahun 1985, saat PM Jepang, Nakasone Yasuhiro melakukan kunjungan ke Kuil Yasukuni bersamaan dengan itu terjadi demonstrasi anti-Jepang yang dilakukan oleh mahasiswa Tiongkok. Setelah itu, dilaksanakan suvey/jajak pendapat di Jepang pada tahun 1980-an, hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa posisi Tiongkok di mata masyarakat Jepang dapat dikatakan cukup negatif.<sup>109</sup> Berlanjut pada tahun 1987 ketika terjadinya Insiden Kokaryo yang melibatkan politikus Jepang dengan pihak Rusia. Pada tahun 1989, mengambil langkah untuk bergabung dengan pihak barat dalam pemberian sanksi kepada Tiongkok karena Insiden Tiananmen.<sup>110</sup>

Keguguran Uni Soviet pada 1991, kembali membawa hubungan Jepang dan Tiongkok menjadi renggang. Keguguran Uni Soviet tersebut telah membuat posisi sekutu salah satu pihak menjadi tidak seimbang. Setelah dinamika politik global

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Ibid.

yang berubah dari unipolar menjadi multipolar, persaingan kekuatan antara Jepang dan Tiongkok di regional Asia Timur kembali memanas. Pasca berakhirnya Perang Dingin, kekuatan ekonomi Tiongkok melesat menjadi lebih kuat, sehingga lahir istilah "Kebangkitan Tiongkok". Menguatnya ekonomi Tiongkok juga dibarengi dengan meningkatnya kekuatan militer yang dimilikinya. Hal ini lagi-lagi menjadi pertimbangan bagi Jepang untuk skeptis kepada Tiongkok. Dalam menanggapi perkembangan militer Tiongkok tersebut, Jepang akhirnya terlibat pada "perlombaan senjata" walaupun perlombaan senjata tersebut terjadi secara diam-diam.<sup>111</sup> Perlombaan senjata tersebut terjadi pada era 2000-an, ketika Jepang terus berusaha menyaingi kekuatan Tiongkok baik dari segi laut, udara, dan amunisi militer.

Tidak hanya sampai disitu, terhitung dari tahun 2001 hingga 2005, Jepang memberikan pernyataan resmi akan mengurangi keterlibatannya dalam kerjasama-kerjasama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.<sup>112</sup> Pengurangan kerjasama terhadap Tiongkok akan dikurangi Jepang secara bertahap. Alasan Jepang mengambil keputusan tersebut dikarenakan bagi Jepang, Tiongkok telah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik sehingga tidak lagi perlu mendapatkan bantuan dari Jepang, terlebih keadaan ekonomi Jepang sendiri tidak selalu stabil. Pada tahun-tahun tersebut, Jepang juga sedang dilanda kesulitan atas dasar hubungannya dengan Amerika Serikat. Pada awal 2000-an tersebut Amerika Serikat sedang mengalihkan fokus utamanya kepada agenda *War on Terror*. Karena pada

---

<sup>111</sup> Ibid.

<sup>112</sup> Aristizábal, *Op. Cit. hal.49*"

masa itu Amerika Serikat sedang banyak terlibat pada konflik-konflik di Timur tengah seperti konflik Afghanistan pada 2001 dan Irak pada tahun 2003.<sup>113</sup> Bahkan pada saat itu Amerika menekan Jepang untuk lebih terlibat aktif pada bidang militer tidak hanya sebatas keterlibatan dalam bidang diplomatik. Hal tersebut menjadi permasalahan karena keadaan Jepang yang saat itu sedang menghadapi kesulitan ekonomi.<sup>114</sup>

Pada awal 2000-an juga merupakan masa kelanjutan dari menurunnya kualitas hubungan antara Jepang dan Tiongkok. Tahun 2002 hingga tahun 2006, pemimpin dari kedua negara ini sama-sama tidak menerima kunjungan luar negeri dari negara kerabat lainnya, hal itu terjadi karena keduanya sedang terlibat konflik mengenai penemuan sumber daya energi berupa minyak bumi dan gas di wilayah sengketa Laut Tiongkok Timur.<sup>115</sup> Namun, pada tahun 2009, hubungan Jepang-Tiongkok kembali memasuki masa-masa membaik. Hal ini berkaitan dengan hasil pemilihan umum PM Jepang, sebab terjadinya pergantian pemimpin diharapkan juga akan membawa arah hubungan menuju arah yang baru. Namun, hal tersebut berakhir menjadi wacana semata dikarenakan pada akhirnya pemimpin terpilih Jepang pada masa itu tidak membawa perubahan signifikan yang berdampak pada dinamika hubungannya dengan Tiongkok.

Persaingan Jepang dan Tiongkok bahkan kembali memanas ketika terjadinya sengketa mengenai kepulauan Senkaku/Diaoyutai pada tahun 2010. Kepulauan ini merupakan cakupan dari lima pulau yang tidak berpenghuni dan tiga

---

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Pío García, *Japón en la geopolítica del siglo XXI*, Oasis, no. 21 (2015): 111.

<sup>115</sup> Aristizábal, *China-Japan bilateral relations: the unforgettable result of history.*"

tumpukan terumbu karang. Kepulauan ini terletak diantara Tiongkok, Jepang, dan Taiwan. Dari perspektif Jepang, menyatakan bahwa kepulauan tersebut telah secara resmi masuk ke daerah kedaulatan mereka sejak tahun 1985.<sup>116</sup> Klaim tersebut berdasarkan pernyataan Jepang yang melakukan klaim telah mengobservasi pulau tersebut selama kurang lebih 10 tahun dan mengetahui bahwa pulau tersebut adalah pulau tidak berpenghuni. Kepulauan ini memiliki posisi penting bagi Jepang karena memiliki letak yang strategis yang berkaitan dengan rute pelayaran kapal-kapal Jepang, serta kemungkinannya yang menyimpan keberagaman jenis ikan serta kemungkinan mengandung cadangan sumber daya minyak.

Sedangkan, dari perspektif Tiongkok menyatakan bahwa kepulauan Senkaku atau bagi Tiongkok adalah kepulauan Diaoyu merupakan wilayah milik Tiongkok sejak dari zaman dahulu dan merupakan bagian perairan yang berada di bawah kedaulatan provinsi Taiwan. Hal ini berkaitan dengan traktat Shimonoseki pada tahun 1980-an ketika Jepang mendapatkan hak kekuasaan untuk wilayah Taiwan.<sup>117</sup> Namun, Taiwan kembali menjadi bagian dari kedaulatan Tiongkok pada saat hadirnya traktat San Francisco, Tiongkok beranggapan ketika pengembalian kedaulatan Taiwan pada Tiongkok maka hal tersebut juga termasuk kepulauan Diaoyu. Atas dasar hal tersebut lah Tiongkok bersikeras mengenai kepemilikannya terhadap kepulauan Senkaku/Diaoyu. Setelah memasuki tahun 2015, Jepang dan Tiongkok terlibat persaingan lebih lanjut, secara lebih spesifik persaingan tersebut

---

<sup>116</sup> “*Di balik sengketa kepulauan di Laut Cina Timur,*” BBC Indonesia, Diakses dari [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2012/09/120911\\_islandsqanda#:~:text=Sengketa kepulauan di Laut Cina Timur ini menimbulkan,tidak berpenghuni yang terletak di Laut Cina Timur.](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/09/120911_islandsqanda#:~:text=Sengketa%20kepulauan%20di%20Laut%20Cina%20Timur)

<sup>117</sup> Ibid.

terjadi pada sektor penyaluran bantuan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur, terkhusus penyaluran bantuan kepada Indonesia.

Secara sederhana, linimasa rivalitas Jepang dan Tiongkok sudah terjadi sejak masa sebelum Perang Dunia II. Walaupun dalam catatan sejarahnya, kedua negara ini terlibat dalam hubungan yang rumit. Jepang-Tiongkok bertemu sebagai musuh pada Perang Tiongkok-Jepang I (1894-1895) dan pada Perang Tiongkok-Jepang II (1937-1945), kemudian terjadi normalisasi dan hubungan kedua negara sempat membaik pada tahun 1970-an. Dalam kurang lebih 50 tahun hubungan Jepang dan Tiongkok, kerap terjadi dinamika yang fluktuatif. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, hubungan Jepang-Tiongkok kembali memburuk ketika kedua negara mengambil langkah keberpihakan yang berbeda pada era perang dingin. Pasca Perang Dingin, persaingan keduanya semakin jelas dan memanas, ketika perekonomian Tiongkok berkembang pesat. Keduanya terlibat dalam persaingan ekonomi regional yang bahkan bukan pada regional asal mereka sendiri.

Pasca terjadinya Perang Dunia II, terjadi dinamika yang cukup signifikan di kawasan Asia Timur. Dinamika yang terjadi ialah terjadinya perbedaan keberpihakan pada masa perang dingin. Jepang menambah kedekatannya dengan Amerika Serikat, disaat yang bersamaan, Tiongkok mempererat hubungannya dengan Uni Soviet.<sup>118</sup> Walaupun terdapat perbedaan dalam pilihan keberpihakan di Perang Dingin, pada tahun 1949-1952 hubungan Jepang dan Tiongkok perlahan memasuki masa rekonsiliasi. Dikatakan sebagai masa rekonsiliasi karena pada

---

<sup>118</sup> Yinan He, *Forty Years in Paradox: Post-normalisation Sino-Japanese relations*, China Perspectives 2013, no. 4 (2013): 7–16.

tahun-tahun itu beberapa perjanjian Jepang dengan negara yang diinvasi telah mencapai titik damai. Hal itu selaras dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian antara Jepang-Tiongkok yang kemudian disebut Perjanjian Taipei resmi berlaku.<sup>119</sup>

Keberpihakan Jepang kepada Amerika Serikat membawa beberapa dampak positif bagi Jepang. Dampak positif yang dimaksud seperti berkembangnya industri lokal Jepang dan Jepang mendapat pengelolaan teknologi mutakhir untuk meningkatkan kemampuan ekonominya di pasar global.<sup>120</sup> Hasil lain dari kemajuan tersebut juga mendorong posisi Jepang pada sistem global yang membuat posisi Jepang menjadi lebih dipandang di mata internasional. Disisi Amerika, keuntungan yang didapat berupa memperoleh sekutu penting untuk kawasan Asia Timur atau Pasifik. Keuntungan tersebut membuahkan berdirinya pangkalan militer AS di Okinawa, yang mana Okinawa pulau milik Jepang yang paling berdekatan dengan Tiongkok. Okinawa juga sering kali menjadi garis terdepan jika terdapat perselisihan yang berkaitan dengan Tiongkok dan beberapa sekutu AS di kawasan Asia Timur.<sup>121</sup>

Sedangkan, keberpihakan Tiongkok pada Uni Soviet memberikan hasil berupa perkonomian Tiongkok yang berfokus pada industri berat.<sup>122</sup> Dari segi politik, keuntungan juga didapatkan oleh Partai Komunis Tiongkok, mengingat Uni

---

<sup>119</sup> Ibid.

<sup>120</sup> Carolina Aristizábal, *China-Japan bilateral relations: the unforgettable result of history*, *Revista Digital Mundo Asia Pacífico* 6, no. 11 (2017): 41–54.

<sup>121</sup> Bernadette A. Puspasingrum, *Kontroversi Pangkalan Militer AS di Okinawa Jepang dan Perubahan Pandangan Warganya karena China*, Kompas.com, Diakses dari <https://www.kompas.com/global/read/2022/10/05/220200070/kontroversi-pangkalan-militer-as-di-okinawa-jepang-dan-perubahan>.

<sup>122</sup> Aristizábal, *Op. Cit.*”

Soviet yang pada masa itu masih berdiri juga memiliki ideologi dan berpegang teguh pada prinsip Komunisme. Tiongkok mengalami kemajuan disaat era kepemimpinan Deng Xiaoping sebagai perdana menteri. Deng Xiaoping membuat langkah baru bagi Tiongkok dengan dibukanya ruang partisipasi Tiongkok di pasar global dan mulai terbukanya Tiongkok dengan PBB.<sup>123</sup> Disaat yang bersamaan juga Deng Xiaoping mulai memperbaiki hubungan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, hal ini dapat terlihat dari terjalannya kerjasama pertukaran teknologi dan terciptanya relasi perdagangan bagi satu sama lain.

Mulai terbukanya Tiongkok dengan AS juga berpengaruh pada hubungan Tiongkok dan Jepang. Tahun 1972 juga menjadi momentum penting, mengingat pada tahun itu pula normalisasi hubungan Tiongkok dan Jepang secara resmi disepakati melalui pengakuan PM Jepang Kakuei Tanaka.<sup>124</sup> Pasca pengumuman resmi perihal normalisasi hubungan kedua negara, perlahan Tiongkok dan Jepang membentuk berbagai perjanjian dan kerjasama. Perjanjian yang dibuat terdapat pada berbagai bidang, seperti perihal perkapalan, dunia penerbangan, perikanan, dan yang paling utama pada bidang perdagangan. Sejak saat itu juga mulai terbentuk ketergantungan ekonomi satu sama lain bagi kedua negara ini.

Ketergantungan ekonomi yang terjadi disebabkan oleh posisi Tiongkok yang melakukan ekspor barang mentah kepada Jepang. Kemudian, Jepang melakukan produksi dari barang mentah tersebut yang berupa barang manufaktur, dan Tiongkok kembali membeli barang jadi tersebut untuk diperjual belikan di

---

<sup>123</sup> Ibid.

<sup>124</sup> He, *Forty Years in Paradox: Post-normalisation Sino-Japanese relations*.”

pasar lokal.<sup>125</sup> Namun, cukup disayangkan, keharmonisan hubungan tersebut tidak bertahan lama. Sekitar tahun 1980-an, kembali terjadi gesekan-gesekan kecil antara Jepang dan Tiongkok, yang kemudian gesekan ini berlanjut menjadi konflik serius sehingga membuat kemajuan hubungan yang telah disebutkan sebelumnya menjadi terkesan sia-sia.

Pada tahun 1990-an, hubungan Jepang dan Tiongkok memasuki fase yang terkesan baik karena pada era itu hubungan kedua negara merupakan hubungan yang bersahabat dan bersifat memperbaiki satu sama lain.<sup>126</sup> Pada saat itu *status quo* yang dimiliki kedua negara memang cukup berbeda. Pada masa itu dapat dikatakan Tiongkok masih pada fase sebagai negara berkembang, sedangkan Jepang telah memiliki perekonomian yang lebih maju, bahkan pada saat itu Jepang beberapa kali memberikan bantuan ekonomi kepada Tiongkok. Namun, seiring berjalannya waktu, Tiongkok berkembang pesat dan memasuki fase yang kerap dikenal sebagai "*The Rise of China*", kebangkitan Tiongkok ini dimulai dengan modernisasi ekonomi Tiongkok, dan semakin berkembang saat Tiongkok mulai menerapkan sistem ekonomi sosialis.<sup>127</sup> Sebagai kedua negara yang berasal dari wilayah yang sama, kebangkitan ekonomi Tiongkok tentu menjadi ancaman tersendiri bagi Jepang.

Pasca berakhirnya Perang Dingin, hubungan antara Jepang dan Tiongkok merupakan salah satu hubungan yang cukup disoroti dalam dinamika hubungan

---

<sup>125</sup> Ibid.

<sup>126</sup> Ibid.

<sup>127</sup> Kai Schulze dan Verena Blechinger-Talcott, *Introduction: Dimensions of Sino-Japanese rivalry in a global context*, *Pacific Review* 32, no. 5 (2019): 725–747, <https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1569116>.

internasional. Menurut salah satu penelitian karya Gonzalez (2011), Jepang dan Tiongkok merupakan pivot bagi perputaran ekonomi di kawasan Asia, sebab kedua negara ini telah berperan besar dalam mendorong perekonomian kawasan, namun dengan catatan kedua menjalankan strategi tersebut dengan cara masing-masing.<sup>128</sup>

Salah satu media paling relevan untuk dialog dan kerjasama antara Jepang dan Tiongkok adalah forum ASEAN-Plus Three. ASEAN-Plus Three (APT) adalah forum kerjasama yang berisikan 10 negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Singapura, Laos, yang kemudian ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kehadiran forum ini membuat citra baik bagi hubungan Jepang-Tiongkok, karena keterlibatan mereka dalam mendorong perekonomian kawasan Asia Tenggara.

Keberadaan Jepang dan Tiongkok dalam ASEAN-Plus Three (APT) walaupun terkesan positif karena telah memberikan dorongan ekonomi, disaat yang bersamaan juga memiliki konsekuensi tersendiri. Disaat bersamaan, hubungan kedua negara ini juga dapat dikatakan sebagai rivalitas. Bertemunya dua kekuatan besar di Asia Tenggara ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN. Baik Jepang maupun Tiongkok seringkali menyalurkan berbagai bantuan atau stimulus ekonomi kepada negara-negara di kawasan ini. Hal ini pada akhirnya dapat dipandang sebagai persaingan kedua negara dalam memperbesar kekuatan dan pengaruh mereka di Asia Tenggara, jika mengacu pada buku karya Michael Yahuda

---

<sup>128</sup> Jose Manuel Orozco Plascencia, Juan Gonzalez Garcia, dan Jose Luis Villa Aguijosa, *CHINA: DESARROLLO REGIONAL DESIGUAL Y REGIONALISMO ECONÓMICO EN EL SIGLO XXI*, Revista Lider 19, no. 64 (2011): 71–90.

berjudul "Sino-Japanese Relations After The Cold War Two Tigers Sharing a Mountain" fenomena ini dinamakan *dua harimau berbagi gunung*.<sup>129</sup>

Selain dari rangkaian sejarah, juga terdapat hal lain yang menjadi penyebab Tiongkok dan Jepang menjadi rival, hal itu ialah latar belakang dan visi milik pemerintah atau pemimpin rezim. Jika dilihat dari sudut pandang pengaruh seorang pemimpin, maka jelas dapat dikatakan visi masing-masing pemimpin berpengaruh secara langsung pada persaingan kedua negara. Contohnya dapat dilihat dari ambisi Presiden Xi Jinping mengenai jalur sutra baru dan kemajuan perekonomian Tiongkok melalui program BRI yang diusungnya. Program BRI digagas oleh Xi atas dasar perspektifnya mengenai sosialisme Tiongkok dalam menghadapi era baru.<sup>130</sup> Program tersebut kemudian, memicu PM Jepang, Shinzo Abe untuk membuat kerjasama ekonomi regional dalam rangka memperkuat dominasi ekonominya di kawasan indo-pasifik, Jepang akhirnya mengeluarkan proyek kerjasama yang dikenal dengan FOIP pada tahun 2016. FOIP memiliki fokus untuk kemajuan perekonomian Jepang sekaligus mempertahankan dominasi ekonominya di Asia.<sup>131</sup>

Dalam jangka waktu pasca diumumkannya proyek BRI Tiongkok, Tiongkok berada dibawah kepemimpinan tokoh yang sama yaitu Presiden Xi Jinping. Hal ini juga menjadi salah satu faktor pendorong teguhnya strategi

---

<sup>129</sup> M. Yahuda, *Sino-Japanese Relations After the Cold War: Two Tigers Sharing a Mountain*, 1 ed. (London: Routledge, 2013).

<sup>130</sup> Zidan Patrio, *Belt and Road Initiative: Program China untuk Kuasai Dunia*, IDN Times, Diakses dari <https://www.idntimes.com/news/world/zidan-patrio/belt-and-road-initiative-program-china-untuk-kuasai-dunia-c1c2?page=all>.

<sup>131</sup> Kenzie Ryvantya, *Free and Open Indo-Pacific Konstruksi Geostrategi Jepang di Kawasan Indo-Pasifik*, Medium, Diakses dari [https://medium.com/@kenzie\\_sr/geopolitik-free-and-open-indo-pacific-c9d3d848b1ef](https://medium.com/@kenzie_sr/geopolitik-free-and-open-indo-pacific-c9d3d848b1ef).

Tiongkok dalam menjalankan proyek besarnya, karena pemimpin negaranya terus menerus dipimpin oleh tokoh yang sama, sehingga tidak ditemukannya perubahan kebijakan yang signifikan. Namun, hal tersebut berbeda dengan Jepang. Dari kurun waktu diumumkannya kebijakan FOIP pada tahun 2016, hingga tahun 2022, Jepang setidaknya telah berganti Perdana Menteri sebanyak tiga kali. Shinzo Abe yang mencetuskan kebijakan FOIP pada saat menduduki kursi PM dari tahun 2012 hingga tahun 2020. Kemudian, PM Jepang berganti menjadi Yoshihide Suga yang memimpin dari tahun 2020 hingga 2021. Namun PM Yoshihide menjabat hanya dalam waktu yang sangat singkat dan melakukan pengunduran diri pada tahun 2021 dikarenakan kemarahan masyarakat Jepang kepadanya akibat gagal menangani penyebaran Covid-19 di Jepang pada tahun itu.<sup>132</sup> Sehingga, PM Jepang kembali mengalami pergantian pada tahun 2021, Yoshihide Suga digantikan oleh Fumio Kishida yang menjabat dari tahun 2021 sampai setidaknya tahun fokus penelitian ini yaitu pada tahun 2022.

Walaupun telah berganti pemimpin beberapa kali, arah kebijakan Jepang, terkhusus kebijakan pada sektor ekonomi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Terlebih ketika terpilihnya Fumio Kishida sebagai PM Jepang menggantikan Yoshihide Suga pada 2021, menjadi penanda berlanjutnya warisan kebijakan Shinzo Abe. Hal ini dikatakan demikian, karena karena Fumio Kishida dan Shinzo Abe merupakan dua tokoh politik yang berasal dari partai yang sama yaitu Partai Demokrat Liberal (LDP) Jepang. Kesamaan partai ini tentunya menjadi

---

<sup>132</sup> Amy Gunia, *Japan's Prime Minister Yoshihide Suga Is Resigning. Here's What That Means*, *Time*, Diakses dari <https://time.com/6094995/japan-prime-minister-suga-resigns/>.

penanda bahwa kedua tokoh ini memiliki latar belakang yang sama dan berpengaruh pada kecenderungannya memutuskan suatu kebijakan. Resminya Fumio Kishida sebagai PM Jepang menjadi sinyal kuat mengenai kestabilan sekaligus keberlanjutan perspektif konservatif warisan dari PM Shinzo Abe.<sup>133</sup>

Tidak dapat dihindari bahwa pada akhirnya status Jepang dan Tiongkok sebagai rival masih berlaku hingga era modern bahkan era pasca pandemi Covid-19. Kedua negara ini sering kali memiliki kepentingan yang serupa di arena yang sama pula. Sebagai contoh selain dari kasus di persaingan di kawasan Asia Tenggara. Jepang dan Tiongkok sama-sama memandang Indonesia sebagai mitra yang strategis. Hal itu dapat terjadi, tidak lain dikarenakan Indonesia sebagai negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki letak strategis sekaligus kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Disaat yang bersamaan, baik Jepang maupun Tiongkok memiliki ketergantungan terhadap impor sumber daya energi dan kedua negara ini juga sama-sama memiliki ambisi untuk memperluas pengaruh masing-masing. Pada akhirnya Jepang dan Tiongkok kembali terlibat persaingan dalam mengambil atensi dan mendapat keberpihakan dari Indonesia.

---

<sup>133</sup> “Siapa Fumio Kishida, Perdana Menteri Baru Jepang?,” *DW*, last modified 2021, diakses Maret 27, 2024, <https://www.dw.com/id/siapa-fumio-kishida-perdana-menteri-baru-jepang/a-59398194>.